

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Suatu pemerintahan baik di dalam negeri maupun luar negeri mempunyai dana yang diberikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk mengelola suatu program dalam pemerintahan, dana yang diberikan tersebut harus dikelola dengan baik dan mempunyai pertanggungjawaban pada saat menggunakannya. Pertanggungjawaban tersebut suatu pemerintahan tersebut harus dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran yang dilakukan dengan cara rekonsiliasi akuntansi pemerintahan.

Pengelolaan keuangan di Indonesia setiap semesteran dilakukan rekonsiliasi semua satker yang selanjutnya dilakukan audit oleh Inspektorat terlebih dahulu kemudian akan diteruskan pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pada berita yang di rilis di warta pemeriksa tanggal 05 Juni tahun 2024 bahwa BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang memuat hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja Kementerian dan Lembaga, dari beberapa tindak lanjut atas rekomendasi maka BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ Perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai Rp. 136,88 triliun Dimana Rp.21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-2023. Hal ini karena adanya standar yang ditetapkan dalam menjalankan pengelolaan keuangan pemerintah

yang seharusnya. Standar tersebut dinamakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sudah ditetapkan. Karena hal ini BPK tidak akan mengeluarkan Opini audit yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Kementerian atau Lembaga jika instansi tersebut tidak mempunyai standar dalam pengelolaannya.

Standar Akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah secara Internasional yaitu International IFRS atau *International Financial Reporting Standards* yang dikeluarkan oleh IASB atau *International Accounting Standards Board*. IFRS 18 ini untuk Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang menggantikan IAS 1 yaitu Penyajian Laporan Keuangan. Standar baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan cara entitas berkomunikasi dalam laporan keuangan dan berlaku efektif hingga 1 januari 2027. Dalam IFRS ini menyatakan bahwa suatu laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi relevan yang secara jujur mewakili aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban suatu entitas (IASB, 2024).

Selain itu juga dalam Standar Akuntansi secara Nasional dinamakan Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 yang mengatur tentang SAP yang berbasis akrual yang mana SAP adalah prinsip akuntansi yang telah diterapkan dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, SAP ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

Dalam penyusunannya sekarang kementerian keuangan sudah mengeluarkan aplikasi yang Bernama SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang mana di dalamnya sudah mempunyai beberapa modul yakni modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul

persediaan, modul aset tetap, modul pelaporan, dan modul administrator. Pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Tujuan dari PMK tersebut adalah untuk mewujudkan suatu tata pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efisien, tertib, bertanggung jawab, transparan dan efektif. Aplikasi tersebut juga dapat mengintegrasikan semua aplikasi satker disuatu instansi tersebut dan telah menerapkan suatu konsep *single database*. Pada sebuah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi tersebut keberadaannya sangat penting. Hal tersebut dikarenakan fungsinya yang sangat *update* dalam suatu pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam suatu Sistem Aplikasi ini pengelola keuangan harus memahami tata cara penyusunan pada laporan keuangan dan cara mengelola informasi yang didapat dari sistem aplikasi tersebut. Sistem ini memberikan suatu informasi yang telah diolah sedemikian rupa mulai awal hingga akhir hanya saja kita harus mengetahui dimana data yang akan diambil untuk dimanfaatkan menjadi alat pengambilan Keputusan suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya SAKTI tersebut kompetensi Sumber Daya Manusia adalah suatu yang dilakukan seseorang di dalam pekerjaan, berupa kemampuan dan keterampilan yang diharuskan dalam memegang suatu pekerjaan (Hidayati, 2021). Jika SDM (Sumber Daya Manusia) tidak mempunyai kompetensi maka pekerja tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, ekonomis, dan efisien. Karena hal tersebut maka akibat yang ditimbulkan adalah terjadi pekerjaan yang lama selesai atau pemborosan waktu dan tenaga. Maka dari itu kompetensi Sumber Daya Manusia harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan agar penyelesaian data atau informasi yang diperlukan tepat waktu.

Kualitas Laporan Keuangan menurut PP nomor 71 tahun 2021 adalah ukuran normatif yang harus diwujudkan ke dalam informasi sistem akuntansi sehingga tujuannya dapat dipenuhi. Adapun karakteristik dari kualitas laporan keuangan tersebut yaitu Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan bisa dipahami. Tujuan dari kualitas laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pengguna agar bisa digunakan dalam pengambilan Keputusan ekonomi.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor 35.b/LHP/XV/05/2024 Tanggal 21 Mei 2024 oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) bahwa menyatakan bahwa instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah diberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) enam kali berturut-turut hingga tahun 2023 sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memperoleh opini WTP dimulai tahun 2017 – 2023 hal tersebut juga terdapat catatan bahwa pada saat pencatatan harus disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya. Khususnya harus teliti dalam pencatatan Persediaan baik Alat dan Obat Kontrasepsi maupun Barang Konsumsi lainnya di aplikasi SAKTI yaitu barang keluar dan barang masuk dan juga perlu diperhatikan apabila ada TKTM (Transfer Keluar Transfer Masuk). Pendapat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian ini diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan tentang kewajaran serta penerapan prinsip akuntansi dalam hal penyusunan laporan keuangan, konsisten dalam menerapkan prinsip

akuntansi dan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan (Junaidi & Nurdiono, 2016).

Dengan hal yang melatarbelakangi peneliti untuk melaksanakan penelitian skripsi Dimana penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang dijalankan pada Instansi Pemerintah yang dijalankan di Indonesia dan Kualitas laporan keuangan harus disusun oleh pengelola laporan keuangan yang sesuai dengan kompetensinya. Karena hal tersebut peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Kompetensi Pegawai” yang akan dilaksanakan di Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan SAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ?
2. Apakah penerapan SAP berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi Pegawai pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ?
3. Apakah Penerapan SAP melalui Kompetensi Pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan SAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
2. Untuk mengetahui Penerapan SAP berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi pegawai pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
3. Untuk mengetahui Penerapan SAP melalui Kompetensi pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan suatu pemikiran untuk memperkaya ilmu dan wawasan tentang variabel yang bisa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sebagai sumber referensi bagi peneliti lainnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan suatu pemikiran terhadap suatu masalah yang ada kaitannya dengan variabel yg berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kemudian dapat menjadi sebuah pertimbangan

suatu instansi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam suatu pengambilan keputusan untuk perbaikan di masa depan.